

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Cina dan Taiwan tak luput dari konflik sejak berpisah pada tahun 1949, yang mana dulunya Taiwan termasuk pulau di daratan Cina dan status Taiwan seringkali diuji karena Pemerintah Cina masih sering menganggap Taiwan merupakan salah satu provinsi Republik Rakyat Cina didukung dengan '*One China Policy*'. Meskipun telah ditanda tangani Konsesnsus tahun 1992 yang disepakati oleh masing-masing perwakilan Partai Komunis Cina (PKC) dan partai politik Kuomintang (KMT), Beijing masih tidak setuju tentang kemerdekaan Taiwan itu sendiri dan masih bersikukuh dengan '*One China*' atau hanya ada 'Satu Cina'. Posisi Taiwan yang demikian, menyulitkan hubungannya dengan dunia luar, misalnya dengan Amerika Serikat (AS) yang pada era Presiden Jimmy Carter mengakui bahwa hanya ada satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina serta memutus hubungan secara diplomatik dengan Taiwan yang kemudian hubungan antara AS dan Taiwan segera diperbaiki dengan undang-undang bilateral baru yaitu *Taiwan Relations Act* (TRA). Setelah kemunculan DPP (oposisi dari KMT) pada 1986 dan di sahkan pada 1989, secara tradisional menyerukan Taiwan merdeka secara de jure sebagai entitas politik independen, dan menjadi tanda untuk ekspresi identitas Taiwan. Cina dan Taiwan menjalin hubungan yang cukup erat dalam berbagai aspek seperti relasi ekonomi meskipun dengan latar belakang hubungan yang cukup konflikktual, walaupun ketika awal terpilihnya terpilihnya presiden Xi

Jinping pada 2012 Cina sempat bersikap tegas terhadap wilayah yang diklaimnya termasuk Hong Kong, Tibet, Xinjiang, dan Taiwan. Ketika terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan pada 2016, membawa udara segar bagi hubungan keduanya dan mengatur ulang hubungan diplomatik formal dengan Cina.¹

Terlepas dari polemik antara Cina dan Taiwan, hubungan ekonomi keduanya berkembang dengan cukup erat bahkan sejak tahun 1970 setelah kebijakan reformasi diterapkan pada kepemimpinan Presiden Deng Xiaoping, Taiwan sudah mulai berinvestasi di Cina. Pada 11 Desember 2001, Cina masuk menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) yang kemudian disusul dengan keanggotaan Taiwan sebagai anggota WTO sebulan kemudian sebagai "*Chinese Taipei*". Keduanya sepakat bahwa bank, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan keuangan lainnya boleh beroperasi baik di Cina maupun di Taiwan, pada tahun 2014 perdagangan bilateral antara China dan Taiwan melejit hingga \$ 198,31 miliar, angka tersebut mengalami kenaikan dari \$ 8 miliar pada tahun 1991.² Pada masa kepemimpinan Presiden Ma Ying-jeou, Taiwan menandatangani kurang lebih 20 pakta kesepakatan dagang termasuk *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA), dan perekonomian Taiwan mengalami keuntungan yang cukup besar, namun kekhawatiran muncul ketika perekonomian Taiwan tumbuh hanya 0,85 persen dan pengangguran kaum muda hampir 13 persen pada 2015 dan harga properti melonjak. Kepemimpinan Presiden Ma menuai banyak kontroversi dan setelah pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Ma hampir berada

¹ Albert, E. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 7.

² Ibid.

dalam tingkat terendah selama kepemimpinannya disusul dengan kekalahan KMT dalam pemilu 2014 dan 2016.³

Pada 29 Juni 2010, Cina dan Taiwan menandatangani perjanjian dagang bilateral yang bertajuk “*Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement*” (ECFA) yang sebenarnya ditandatangani oleh dua partai di kedua negara tersebut yakni antara *Taiwan’s Strait Exchange Foundation* (SEF) dan *China’s Association for Relations across the Taiwan Strait* (ARATS) dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada WTO.⁴ ECFA sendiri merupakan kesepakatan antara Cina dan Taiwan yang membentuk area perdagangan bebas atau *Free Trade*

³ Albert, E. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 7.

¹ Karena Cina merupakan mitra dagang Taiwan yang terbesar, maka tak heran bila ketergantungan perekonomian Taiwan terhadap Cina cukup tinggi serta berkelanjutan. Meskipun demikian, pembatasan-pembatasan dalam relasi dagang antara Cina dan Taiwan masih berlaku terutama beberapa pembatasan oleh Taiwan terhadap pasar Cina. Misalnya larangan Taiwan terhadap investasi langsung dari Cina dan membatasi jumlah investasi, hal tersebut dilakukan karena perusahaan Cina terlibat dalam investasi langsung luar negeri yang terbatas, aliran dari Cina ke Taiwan kemungkinan besar akan dibatasi (Mastel, 2001).

² Pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh Taiwan terhadap Cina disebabkan oleh latar belakang politik dan keamanan keduanya yang cukup panas sehingga Taiwan memberlakukan sejumlah pembatasan pada pengiriman, perdagangan, perjalanan, dan investasi karena kekhawatiran bahwa kegiatan ini dapat menimbulkan ancaman bagi negara. Salah satu hambatan dalam hubungan ekonomi (perdagangan) antara Cina dan Taiwan adalah isu ‘penyatuan kembali’ yang akhirnya membuat satu sama lain merasa terancam. Hambatan lain adalah status Taiwan yang tidak resmi dari kaca mata Cina menjadikan beberapa produk dari Taiwan sulit masuk ke Cina meskipun investasi di Taiwan di Cina cukup baik namun masih ada batasan ‘formal’ yang cukup sulit dilalui oleh Taiwan. Relasi dagang lintas selat antara Cina dan Taiwan sebelum menjadi anggota WTO masih bertantangan dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan di WTO, maka dari itu keanggotaan Cina dan Taiwan di WTO menjadi angin segar bagi relasi dagang antara keduanya dan akan membawanya pada ranah liberalisasi perdagangan (Mastel, 2001). Meskipun telah menjadi anggota WTO, baik hubungan dagang keduanya masih naik turun diawali dengan pencabutan larangan atas 2.374 kategori produk pada 2002, selama kurun waktu 2002 hingga 2006 hubungan dagang bilateral keduanya masih bergejolak hingga akhirnya pada 2006 hubungan ekonomi keduanya mulai stabil (Armstrong, 2013).

⁴ WTO. [n.d]. Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement
The objectives of this Agreement are: (1) to strengthen and advance the economic, trade and investment cooperation between the two Parties; (2) to promote further liberalization of trade in goods and services between the two Parties and gradually establish fair, transparent and facilitative investment and investment protection mechanisms; (3) to expand areas of economic cooperation and establish a cooperation mechanism.

Area (FTA) antara keduanya yang diawali dengan daftar barang industri, manufaktur, dan jasa yang dinamakan dengan “*early harvest list*”. Secara tidak langsung, keduanya menjadi mitra perdagangan alami, hal ini dibuktikan dengan lonjakan investasi asing atau *foreign direct investment* (FDI) dari Cina ke Taiwan pada awal 1990-an yang mengakibatkan ketergantungan perekonomian Taiwan terhadap Cina sangat tinggi. Tercatat FDI yang diluncurkan Cina ke Taiwan meningkat dari US \$ 1.830 juta pada tahun 1991 menjadi US \$ 16.432 juta pada tahun 2007 dan menjadi puncak tertinggi FDI dari Cina ke Taiwan.⁵

*“Under the ECFA, China will gradually lower tariffs for 539 categories of imports and open 11 service categories and 18 farm and fishery categories to trade while Taiwan has agreed gradually to reduce tariffs on 267 items, most of which are industrial components. These policy measures will be phased in over time to minimise the cost of adjustment.”*⁶

Bergulirnya ECFA pada 1 Januari 2011 menuai pro dan kontra, diantara yang pro dengan perjanjian ini berpendapat bahwa efek dari ECFA sendiri dapat membantu Taiwan agar tidak termarginalkan dari perdagangan internasional. Selain itu, ECFA memungkinkan perusahaan Taiwan ke Cina lebih awal masuk di beberapa industri, khususnya sektor keuangan, dan ECFA akan meningkatkan daya saing industri Taiwan karena persamaan budaya Taiwan dan Cina yang secara tidak langsung menguntungkan perusahaan-perusahaan Taiwan. Kontra yang muncul

⁵ Hong, T. L., & Yang, C. H. (2011). The economic cooperation framework agreement between China and Taiwan: Understanding its economics and politics. *Asian Economic Papers*, 10(3), 79-96.

⁶Armstrong, S. P. (2013). Taiwan's Asia Pacific economic strategies after the Economic Cooperation Framework Agreement. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 18(1), 98-114.

karena perjanjian ini adalah tidak ada urgensi dari kesepakatan dagang bilateral antara Cina dan Taiwan pihak oposisi beranggapan bahwa akan tumpang tindih dengan perjanjian antara Cina dan ASEAN, kemudian ECFA juga akan memperburuk distribusi pembagian upah bagi tenaga kerja di Taiwan.⁷ Dalam tulisan Chow (2012), mengatakan bahwa Taiwan sebenarnya tidak memiliki keunggulan komparatif dari Cina dalam komoditas agrikultur dan apabila perdagangan dengan Cina sepenuhnya diliberalisasi dalam ECFA tersebut, maka sektor pertanian Taiwan akan terancam turun.⁸

Pendapatan Taiwan melalui sektor agrikultur hingga pertengahan 2021 mengalami penurunan dari 2021, yakni dari 103.278 juta TWD menjadi 88.446 juta TWD.⁹ Menurut laporan dari *Trading Economics*, setiap tahunnya, PDB yang diperoleh dari sektor pertanian mengalami naik turun yang sangat parah.¹⁰ Berikut adalah grafik PDB sektor pertanian Taiwan.

⁷ Hong, T. L., & Yang, C. H. (2011). The economic cooperation framework agreement between China and Taiwan:

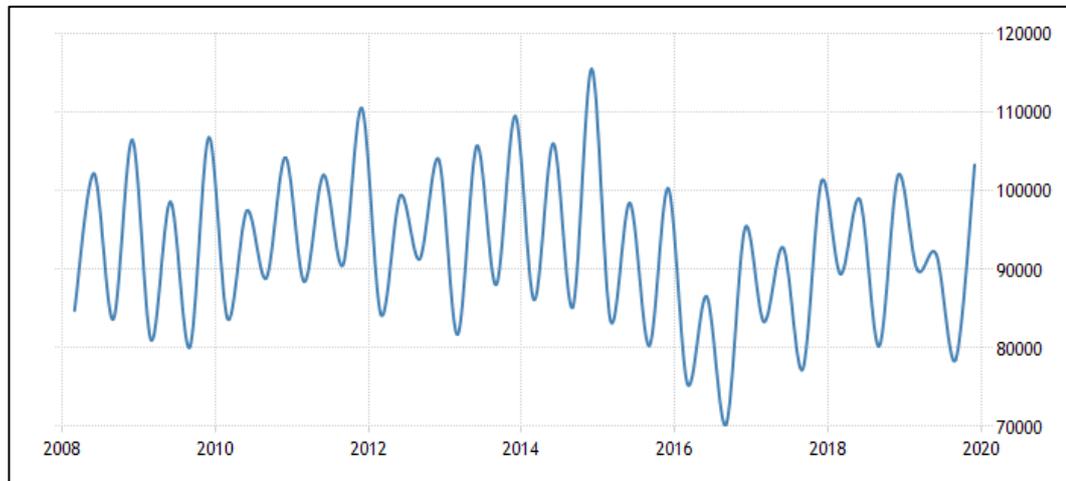
Understanding its economics and politics. *Asian Economic Papers*, 10(3), 79-96.

⁸ Chow, P. (Ed.). (2012). *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*. Springer

⁹ Trading Economics. (2021, June 27). *Taiwan GDP From Agriculture*. Retrieved from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/taiwan/gdp-from-agriculture>

¹⁰ Ibid.

Grafik 1.1 PDB sektor agrikultur Taiwan 2008-2020 (dalam jutaan TWD)



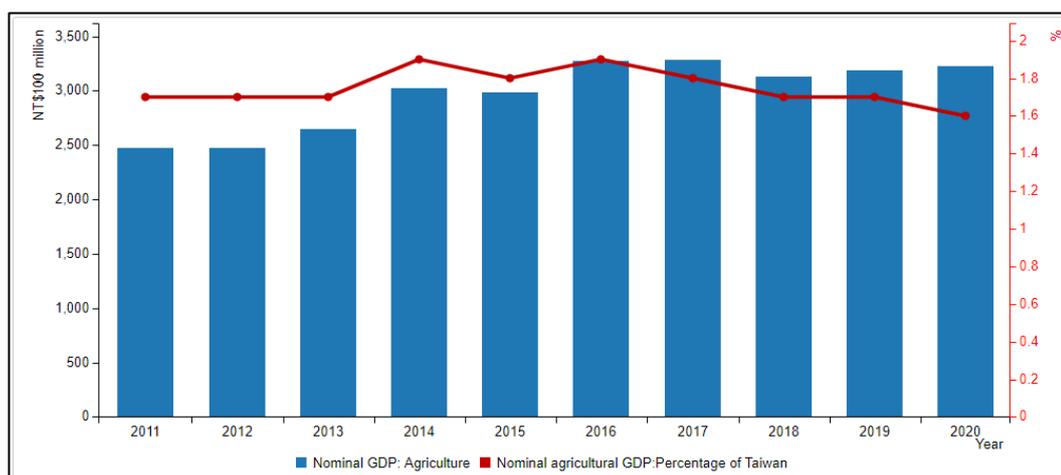
Sumber: *Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Taiwan* dalam laman *Trading Economics*.¹¹

COA melaporkan nominal dan prosentase PDB Taiwan yang diperoleh dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan tahun 2011 hingga 2020 dalam sebuah grafik. Pada tahun-tahun pertama yakni 2011 dan 2012 baik prosentase maupun nominalnya tidak mengalami perubahan. Lalu kenaikan mulai terjadi di tahun 2013 dan di 2014 kenaikan cukup pesat terjadi. Di tahun 2015 penurunan terjadi yang memulai terjadinya fluktuasi baik prosentase maupun nominalnya. Berikut adalah grafik lengkapnya.¹²

¹¹ Trading Economics. (2021, June 27). *Taiwan GDP From Agriculture*. Retrieved from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/taiwan/gdp-from-agriculture>

¹² COA. (2021, June 27). *Agriculture, Forestry, Fishery, Husbandry Nominal Production and Its Percentage of GDP*. Retrieved from Council of Agriculture: <https://echart.coa.gov.tw/index.php?cid=2>

Grafik 1.2 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Produksi Nominal Peternakan dan Persentasenya terhadap PDB 2011-2020



Sumber: Dikutip langsung dari laman resmi COA Taiwan.¹³

Dalam “*early harvest list*” berbagai produk-produk yang dipasarkan baik di pasar Taiwan maupun Cina dengan ketentuan-ketentuan tertentu, salah satu produk unggulan yang dimiliki Taiwan dan termasuk dalam daftar produk di ECFA adalah produk agrikultur dan cukup menjanjikan performanya bagi Taiwan.¹⁴ Faktanya adalah dalam ECFA Taiwan tidak membuka pasar mereka untuk berbagai produk agrikultur dari Cina serta tidak mengizinkan tenaga kerja dari Cina ke Taiwan.¹⁵ Ada 18 produk pertanian dan perikanan yang masuk dalam daftar pengurangan tarif di ECFA, antara lain anggrek, pisang, jeruk, teh, ikan hidup dan beku yang akan lebih menguntungkan Taiwan dalam sektor agrikultur dibanding

¹³ COA. (2021, June 27). *Agriculture, Forestry, Fishery, Husbandry Nominal Production and Its Percentage of GDP*. Retrieved from Council of Agriculture:

<https://echart.coa.gov.tw/index.php?cid=2>

¹⁴ Liu, D. N., & Shih, H. T. (2012). New Economic Development Opportunities for Taiwan in the Post-ECFA Era. *Asie. Visions*, 51, 1-41.

¹⁵ Mainland Affairs Council. (2021, March 04). *Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)*. Retrieved from Mainland Affairs Council:

<http://www.mac.gov.tw/public/data/051116322071.pdf>

Cina.¹⁶ Sektor pertanian di Taiwan memerankan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan TaiwanICDF telah bermitra dengan banyak negara dalam proyek-proyek pertanian, bahkan proyek pertanian telah menjadi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Taiwan sejak 1959 dengan mengirim bantuan teknis pertanian pertama ke Vietnam.¹⁷

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis, literatur banyak membahas tentang dampak ECFA pada beberapa sektor seperti investasi dan perikanan serta hubungan dagang keduanya setelah ECFA berlaku pada 2011. Dalam satu jurnal Ahn 2014 yang membahas tentang dampak ECFA terhadap pasar ikan kerapu di Taiwan dan Cina, sempat menyinggung perihal sektor agrikultur Taiwan lebih diuntungkan dalam ECFA karena larangan terhadap produk agrikultur Cina ke Taiwan. Namun dalam jurnal lain, seperti yang sudah disebutkan di atas, apabila perdagangan dengan Cina diliberalisasi sepenuhnya maka sektor agrikultur akan mengalami penurunan karena akan kalah dengan produk agrikultur Cina.¹⁸ Maka dari itu dalam tulisan ini penulis ingin meninjau lebih lanjut bagaimana ingin meninjau dampak perjanjian ECFA Cina-Taiwan terhadap kebijakan ekspor untuk mendorong ekspor produk agrikultur di Taiwan yang berpotensi dirugikan dalam ECFA Cina-Taiwan tahun 2011-2018.

¹⁶ Ahn, B. I., Liao, P. A., & Kim, H. (2014). Impacts of the cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement on the grouper fish markets in Taiwan and mainland China. *China Agricultural Economic Review*.

¹⁷ TaiwanICDF. (n.d.). *Agriculture*. Retrieved from <https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12410&ctNode=29859&mp=2>

¹⁸ Chow, P. (Ed.). (2012). *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*. Springer

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, penelitian ini akan meninjau lebih lanjut dampak perjanjian ECFA Cina-Taiwan terhadap kebijakan ekspor untuk mendorong ekspor produk agrikultur di Taiwan yang berpotensi dirugikan dalam ECFA Cina-Taiwan tahun 2011-2018. Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam tulisan ini adalah; Bagaimana respons Pemerintah Taiwan dalam mendorong ekspor produk agrikultur Taiwan sebagai dampak perjanjian *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) Cina-Taiwan (2011-2018)?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Secara Umum

Secara umum penelitian ini ditujukan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Secara Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meninjau dampak dari sebuah *free trade agreement* (FTA) terhadap kebijakan ekspor salah satu negara anggota untuk mendorong ekspor pada sektor agrikultur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional dalam hal perjanjian perdagangan bebas/

FTA yang berdampak pada sektor agrikultur spesifik pada kebijakan ekspor agrikultur.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 *Free Trade Agreement (FTA)*

Free Trade Agreement atau FTA menurut Krueger 1997 merupakan kegiatan perdagangan bebas yang merujuk pada mekanisme pengurangan tarif menjadi nol untuk semua transaksi perdagangan baik barang maupun jasa pada transaksi dagang antar negara anggota. Dengan catatan bahwa FTA tidak menghilangkan hambatan pada perdagangan eksternal, FTA hanya akan menghilangkan hambatan perdagangan dengan negara anggota saja.¹⁹ Negara-negara yang melakukan FTA sebenarnya juga memiliki resiko karena perbedaan tarif, seperti 'defleksi perdagangan' (kondisi dimana barang maupun jasa diangkut ke negara anggota lainnya dengan biaya terendah), regulasi dalam FTA yang memungkinkan negara asal untuk 'mengirim' aturan atau perlindungan pada produsen asal negara mereka ke negara anggota lain melalui insentif, dan karena adanya perlindungan tersebut maka barang yang diperdagangkan bisa saja tidak dapat mencapai harga umum di pasaran.²⁰ Meskipun beresiko, negara-negara tetap melakukan FTA karena pada dasarnya "negara-negara 'mengakui' langkah-langkah yang sebenarnya baik untuk mereka, dan sebagai imbalannya menerima 'konsesi'

¹⁹ Krueger, A. O. (1997). Free trade agreements versus customs unions. *Journal of Development Economics*, 54(1), 169-187.

²⁰ Ibid.

dari mitra negosiasi mereka” mengacu pada prinsip klasik GATT.²¹ FTA tidak serta merta beresiko, ada ‘manfaat’ yang dirasakan oleh negara-negara anggota, dengan adanya *‘trade creation’*, memungkinkan untuk menggantikan pendapatan tarif dengan biaya transportasi dalam FTA kemungkinan besar akan mengalami kerugian, manfaat lain yang didapat adalah secara tidak langsung kepentingan dari negara anggota dapat membawa kepentingan politik mereka.²²

Dalam ulasan Melchior 2018, FTA merujuk pada istilah yang lebih luas yakni semua jenis perjanjian antar subset (himpunan) negara dengan tujuan untuk meliberalisasi perdagangan barang atau jasa. Melchior 2018 mengasumsikan bahwa FTA adalah tentang pengurangan diskriminasi dalam hambatan perdagangan, dalam hal ini hambatan perdagangan merupakan tarif yang mana merujuk pada model perdagangan dunia yang disebut “*tariff equivalent syndrome*”. Dengan adanya pengurangan tarif tersebut (non-tarif) maka kemungkinan adanya diskriminasi perdagangan dalam FTA sangat kecil, tarif merupakan kunci utama, FTA menyebabkan pemotongan tarif yang substansial.²³ Selain itu, dalam ulasan ini juga membahas bahwa dalam FTA terdapat ‘kesetaraan tarif, hal tersebut jika dilihat dari kaca mata *trade policy spillovers*, pengurangan biaya perdagangan (tarif) dalam FTA dapat menguntungkan negara ketiga.²⁴

Menurut Athurkorala 2020, FTA merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih dengan menghapus tarif-tarif perdagangan antar negara

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Melchior, A. (2018). Free Trade Agreements and Globalisation. *the Shadow of Brexit and Trump*. Cham: Palgrave Macmillan, 276.

²⁴ Ibid.

anggota (namun tidak menghapus tarif perdagangan dengan negara yang bukan merupakan anggota). Meskipun demikian, dalam praktiknya, tarif tidak sepenuhnya dihapus, konsesi tarif dilakukan secara selektif karena penyesuaian industri terkait dengan liberalisasi perdagangan dan lobi atau negosiasi antar negara anggota tentang penetapan tarif.²⁵ Ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam FTA tertuang dalam *rules of origins* (RoO) yang isinya seperti daftar kriteria kelayakan produk dan preferensi tarif.²⁶ Dalam FTA perlu menggabungkan dua elemen yakni konsesi tarif perdagangan dengan RoO untuk mencegah terjadinya ‘defleksi perdagangan’, perlu adanya pemahaman pasar ketika menyusun RoO.²⁷ Tingkat keberhasilan perdagangan dalam FTA tergantung pada dua faktor yakni ‘respons pasokan’ dan ‘kompatibilitas perdagangan’, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ‘respon penawaran’ yang mengacu pada kapasitas ekonomi untuk meningkatkan penawaran ekspor dan untuk mencapai keuntungan produktivitas dengan menghadapi persaingan impor di bawah FTA.²⁸ Faktor-faktor tersebut tak lepas dari faktor-faktor lain untuk menghadapi FTA, faktor lain ini biasanya berupa kebijakan perdagangan, kebijakan industri, serta infrastruktur kelembagaan seperti pengembangan sumber daya manusia.²⁹

Terkait dampak FTA terhadap sektor agrikultur, Hodo 2014 mengulas sebuah negara yang merupakan anggota dari FTA, dalam ulasannya, dibawah

²⁵ Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. *Foreign Trade Review*, 55(1), 13-20.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. *Foreign Trade Review*, 55(1), 13-20.

²⁹ Ibid.

skema FTA, negara mengalami penurunan harga dan peningkatan volume impor dan ekspor. Hal ini dipengaruhi oleh non-tarif yang diberlakukan sehingga memberikan kesempatan pada sektor industri agrikultur sebuah negara untuk mengekspor maupun mengimpor produk dengan mudah.³⁰ Dengan adanya FTA, sektor pertanian dalam negeri meningkat, produksi sektor pertanian pun juga meningkat, hal ini dipengaruhi oleh daya saing kualitas produk yang semakin meningkat dengan adanya FTA yang mengarah pada peningkatan ekspor produk agrikultur.³¹ Dalam upaya meningkatkan sektor pertanian, negara melakukan pameran internasional untuk meningkatkan promosi produk mereka di negara kawasan bekerja sama dengan kementerian pariwisata.³² Selain itu juga dengan konsolidasi pasar tanah bersama negara kawasan, meningkatkan produktifitas dalam negeri, meningkatkan subsidi untuk para petani, meningkatkan kualitas dan standar produk pertanian dalam negeri, dan jaminan pada produk pertanian.³³

1.5.1.2 Kebijakan Ekspor

Dalam ulasan Reid 1983, para peneliti seperti James Walsh dan Joseph Talarico, Tom Becker, dan Michael Czinkota dalam buku *Export Policy: A Global Assessment* membahas masalah kebijakan ekspor. Reid 1983 menjelaskan bahwa dalam buku tersebut teori kebijakan ekspor merujuk pada hubungan erat antara kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan beberapa faktor lainnya.

³⁰ Hodo, M. (2014). The impact of Trade Agreements on Agriculture Sector, Import and Export: Albanian Case. *Journal of Educational and Social Research*, 4(4), 421-421.

³¹ Ibid.

³² Hodo, M. (2014). The impact of Trade Agreements on Agriculture Sector, Import and Export: Albanian Case. *Journal of Educational and Social Research*, 4(4), 421-421.

³³ Ibid.

Menurut Michael Czinkota, untuk meningkatkan efektifitas ekspor, maka pembuat kebijakan harus bersinergi dengan pihak swasta (perusahaan) dalam pembuatan programnya dalam hal ini berkaitan dengan promosi ekspor mereka.³⁴ Dari penjelasan tersebut, maka indikator atau elemen dari kebijakan ekspor adalah sebagai berikut; (1) kebijakan luar negeri mengacu pada peraturan yang mengatur jalannya perdagangan dan upaya untuk mengembangkan ekspor; (2) peraturan perdagangan mengacu pada regulasi dan peraturan seperti persyaratan dokumen dan hal-hal yang memudahkan kelangsungan ekspor (memudahkan para eksportir); dan (3) perusahaan mengacu pada perusahaan perdagangan ekspor sebagai instrumen untuk membuka potensi di perusahaan kecil dan menengah dalam upaya promosi ekspor.³⁵

Pertama, kebijakan luar negeri, dalam ulasan Reid 1983 kebijakan luar negeri mengacu pada peraturan yang mengatur jalannya perdagangan dan upaya untuk mengembangkan ekspor.³⁶ Menurut Cooper 1972 kebijakan luar negeri atau *foreign policy* kaitannya dengan sektor agrikultur, kebijakan luar negeri mengacu pada pembentukan aturan yang mengatur perdagangan internasional (aturan umum yang mengatur hubungan perdagangan antar negara), mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan (seperti tarif dan kuota impor), dan komitmen dagang (prosedur perdagangan yang akan berpengaruh pada sanksi apabila terjadi pelanggaran dan penyelesaian masalah antar negara apabila terjadi

³⁴ Reid, S. D. (1983). *Export Trilogy Sets Research Agenda*.

³⁵ Reid, S. D. (1983). *Export Trilogy Sets Research Agenda*.

³⁶ *Ibid*.

kesalahpahaman).³⁷ Dalam ulasan Paarlberg 1982, upaya untuk meningkatkan ekspor agrikultur dapat dilakukan melalui dua kebijakan luar negeri, pertama adalah kebijakan intervensi pasar yang diwujudkan dalam perjanjian pembelian dan penjualan bilateral, kredit ekspor, dan bahkan subsidi ekspor mungkin diperlukan untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar.³⁸ Kedua adalah *political rather than economic*, yakni dengan membedakan perlakuan yang dilakukan negara eksportir kepada negara importir tergantung hubungan antar kedua negara tersebut, perlakuan “baik” dengan memberikan bantuan makanan atau perdagangan komersial preferensial sedangkan perlakuan “kurang baik” dengan melakukan penghentian bantuan pangan atau embargo ekspor komersial.³⁹ Dalam kasus ekspor agrikultur, pelanggaran seperti pungutan impor variabel yang berkaitan dengan subsidi impor merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara dengan dalih perlindungan perdagangan namun akan menciptakan tekanan dan berpotensi merugikan negara lain.⁴⁰

Kedua peraturan perdagangan yang dalam ulasan Reid 1983 mengacu pada regulasi dan peraturan seperti persyaratan dokumen dan hal-hal yang memudahkan kelangsungan ekspor (memudahkan para eksportir).⁴¹ Menurut De Freitas 1990 perbedaan yang cukup mencolok antara kebijakan luar negeri dan peraturan perdagangan nasional terkait dengan agrikultur adalah apabila kebijakan luar negeri mengarah pada kecukupan dasar dalam pangan dan menuju ekspor produk

³⁷ Cooper, R. N. (1972). Trade policy is foreign policy. *Foreign Policy*, (9), 18-36.

³⁸ Paarlberg, R. L. (1982). Food as an instrument of foreign policy. *Proceedings of the Academy of Political Science*, 34(3), 25-39.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Cooper, R. N. (1972). Trade policy is foreign policy. *Foreign Policy*, (9), 18-36.

⁴¹ Reid, S. D. (1983). Export Trilogy Sets Research Agenda.

pertanian berkualitas tinggi, sedangkan peraturan perdagangan nasional mengarah pada langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan ketahanan pangan nasional, dalam arti perlindungan produksi, serta berkontribusi pada perdagangan internasional.⁴² Menurut ITC 2011, untuk meningkatkan performa ekspor, maka dalam kebijakan perdagangan dan peraturan perdagangan diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh eksportir.⁴³ Hal-hal tersebut dapat dituangkan dalam program-program seperti pertukaran kunjungan petani untuk mengetahui kondisi pertanian di masing-masing negara, *youth exchange programs* yang bertujuan untuk mempromosikan produk pertanian lokal pada peserta yang ikut dalam program tersebut, dan program pertukaran untuk pejabat Bea Cukai, administrasi, dan perdagangan dengan tujuan memperbaharui persyaratan, standar, perdagangan, dan prosedur administrasi Bea Cukai. Untuk melindungi produksi dalam negeri adalah dengan diversifikasi pertanian, intensifikasi, dan rencana pembangunan yang diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam produksi tersebut.⁴⁴

Ketiga perusahaan dalam ulasan Reid 1983 mengacu pada perusahaan perdagangan ekspor sebagai instrumen untuk membuka potensi di perusahaan kecil dan menengah dalam upaya promosi ekspor.⁴⁵ Charlet 1991 menyebutkan bahwa

⁴² De Freitas, P. M. (1990). Realities of national and international trade regulations and policies. *HortScience*, 25(1), 35-38.

⁴³ ITC. (2011). *National Trade Policy for Export Success*. International Trade Center.

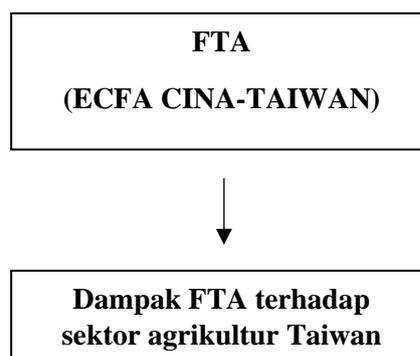
⁴⁴ De Freitas, P. M. (1990). Realities of national and international trade regulations and policies. *HortScience*, 25(1), 35-38.

⁴⁵ Reid, S. D. (1983). *Export Trilogy Sets Research Agenda*.

upaya promosi ekspor dari sektor pertanian memerlukan kerjasama berkelanjutan dalam agribisnis, tujuan yang mendasari hal tersebut dari sudut pandang administrasi proyek adalah untuk mengembangkan hubungan positif melalui pengelolaan pada perusahaan yang memiliki "value added".⁴⁶ Hasil dari penelitian Charlet 1991 keberhasilan ekspor dilakukan oleh perusahaan ekspor kecil dan menengah (*small medium enterprise*). Perusahaan ekspor kecil menengah memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara terutama dalam lapangan pekerjaan baru dan nilai ekspor.⁴⁷ Berikut adalah program yang mendukung ekspor usaha kecil menengah antara lain, pelatihan ekspor; akses ke informasi untuk para pelaku usaha, membangun fasilitas perdagangan; inisiatif *e-commerce*; dan program pengembangan pemasok.⁴⁸

1.6 Sintesa Pemikiran

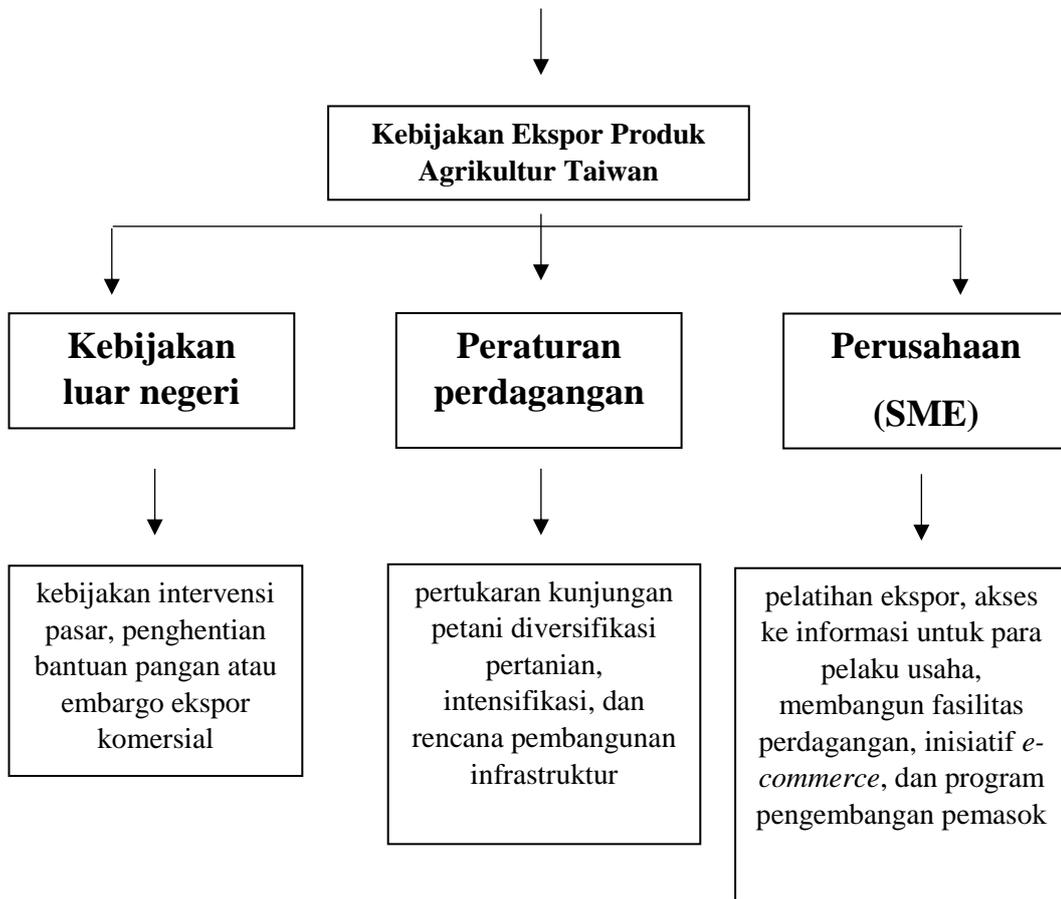
Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



⁴⁶ Charlet, B. &. (1991). Oklahoma's Value-Added Agricultural Export Industry: AnAnalysis of Export Market Activities. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 3(3), 55-81.

⁴⁷ Charlet, B. &. (1991). Oklahoma's Value-Added Agricultural Export Industry: AnAnalysis of Export Market Activities. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 3(3), 55-81.

⁴⁸ OECDiLibrary. (2020). *Chapter 6. SME export policies in Brazil*. Retrieved from OECDiLibrary: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3b736839-en/index.html?itemId=/content/component/3b736839-en>



Penulis menyusun kerangka sintesa pemikiran di atas berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sintesa pemikiran di atas, penulis ingin meninjau perjanjian ECFA Cina-Taiwan yang berdampak terhadap kebijakan ekspor untuk mendorong ekspor agrikultur Taiwan. Kebijakan ekspor agrikultur Taiwan merupakan respon atas perjanjian ECFA antara Cina dan Taiwan yang berpotensi merugikan sektor pertanian Taiwan karena sebenarnya produk pertanian Taiwan tidak memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan Cina. Indikator yang digunakan untuk menganalisa data adalah kebijakan luar negeri berupa kebijakan intervensi pasar dan penghentian bantuan pangan atau embargo

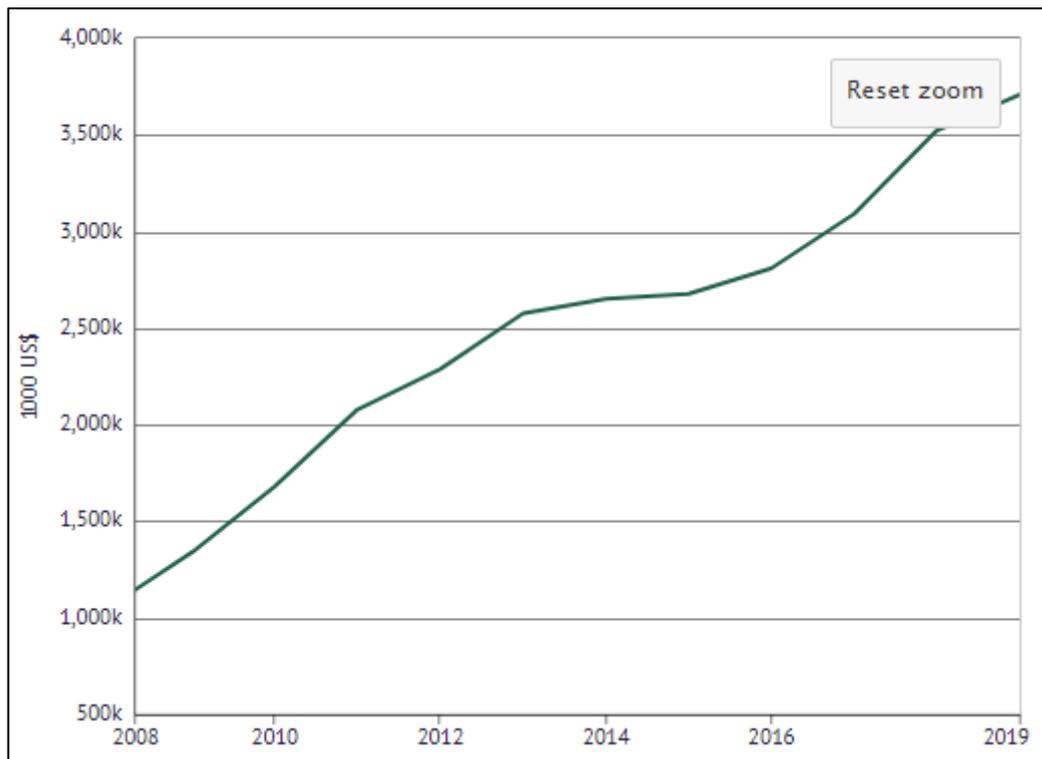
ekspor komersial; peraturan perdagangan yang diwujudkan dalam pertukaran kunjungan petani diversifikasi pertanian, intensifikasi, dan rencana pembangunan infrastruktur; dan perusahaan yakni perusahaan kecil menengah atau *small and medium enterprise* (SME) melalui pelatihan ekspor; akses ke informasi untuk para pelaku usaha, membangun fasilitas perdagangan; inisiatif *e-commerce*; dan program pengembangan pemasok. Dari ketiga indikator yang ditinjau tersebut, nantinya penulis akan menemukan kesimpulan dari ketiganya di akhir tulisan ini.

1.7 Argumen Utama

Taiwan akan melakukan respons dalam kebijakan ekspor pada 2011 hingga 2018 untuk mendorong tingkat ekspor produk agrikultur melalui tiga elemen yakni yang pertama kebijakan luar negeri, melalui kebijakan luar negeri yang diwujudkan dalam dua kebijakan yakni kebijakan intervensi pasar yang perjanjian pembelian dan penjualan bilateral, kredit ekspor, dan bahkan subsidi ekspor mungkin diperlukan untuk mempertahankan atau memperluas pangsa pasar. Kebijakan luar negeri yang lain adalah *political rather than economic*, yakni dengan membedakan perlakuan yang dilakukan negara eksportir kepada negara importir tergantung hubungan antar kedua negara tersebut, perlakuan “baik” dengan memberikan bantuan makanan atau perdagangan komersial preferensial sedangkan perlakuan “kurang baik” dengan melakukan penghentian bantuan pangan atau embargo ekspor komersial. Kedua melalui peraturan perdagangan yang diwujudkan dalam undang-undang atau langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan ketahanan pangan nasional, dalam arti perlindungan produksi, serta berkontribusi pada perdagangan internasional. Peraturan perdagangan nantinya dapat

diimplementasikan dalam berbagai program seperti pertukaran kunjungan petani untuk mengetahui kondisi pertanian di masing-masing negara, melindungi produksi dalam negeri dengan diversifikasi pertanian, intensifikasi, dan rencana pembangunan yang diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam produksi. Ketiga, perusahaan yaitu berupa program yang mendukung ekspor usaha kecil menengah seperti, pelatihan ekspor; akses ke informasi untuk para pelaku usaha, membangun fasilitas perdagangan; inisiatif *e-commerce*; dan program pengembangan pemasok.

Grafik 1.3 Nilai ekspor agrikultur Taiwan 2008-2019



Sumber: Dikutip langsung dari laman Knoema.⁴⁹

⁴⁹ Knoema. (2021, June 27). *The exports of agricultural products from Taiwan Province of China*. Retrieved from Knoema: <https://knoema.com/search?query=taiwan%20agricultural%20export>

Ekspor produk pertanian Taiwan pada 2009 mencapai \$3,43 miliar, di tahun 2010 mengalami kenaikan 16,1% menjadi \$3,99 miliar.⁵⁰ Dilansir dari Knoema, nilai ekspor agrikultur Taiwan pada 2011 (setelah ECFA bergulir) mengalami kenaikan setiap tahunnya seperti pada grafik di atas.⁵¹ Menurut COA, Taiwan mengalami puncak tertinggi ekspor produk agrikultur pada 2018 yang mencapai NT\$164,6 miliar dan menjadikannya sebagai rekor tertinggi selama kurun waktu 20 tahun.⁵² Meskipun 2019 kenaikan ekspor masih terjadi pada paruh pertama, yakni sebesar 11,3% dan 6,5%. dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kenaikan pada 2018 masih menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun.⁵³

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif. Menurut Carter (1998), metode penelitian eksplanatif proses menghimpun hubungan antara fenomena satu dengan lainnya (diwujudkan dalam sebuah teori) yang dijelaskan secara eksplisit. Dengan kata lain, metode penelitian eksplanatif memetakan hubungan antara fakta dan teori. Ketika fakta dan teori bertemu dalam

⁵⁰ COA. (2021, June 27). *Export of Taiwan Agricultural Products Has Outstanding Results, with January-July Exports Growing 21%*. Retrieved from Council of Agriculture: https://eng.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=eng_news&id=289

⁵¹ Knoema. (2021, June 27). *The exports of agricultural products from Taiwan Province of China*. Retrieved from Knoema: <https://knoema.com/search?query=taiwan%20agricultural%20export>

⁵² COA. (2021, June 27). *Exports of Taiwan agriproducts reach new high in the first half of 2019; more moves are expected for developing new*. Retrieved from Council of Agriculture: https://eng.coa.gov.tw/theme_data.php?theme=eng_news&id=575

⁵³ Ibid.

satu hubungan tautologis, maka fenomena tersebut sudah dijelaskan atau dengan kata lain hubungan sebab dan akibat.⁵⁴

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder untuk menunjang penelitian ini. Data yang digunakan adalah data kebijakan ekspor terkait dengan ekspor produk agrikultur Taiwan 2011-2018 melalui data sekunder yang dirangkum dari jurnal artikel terkait, laman resmi seperti laman resmi WTO, *Council of Agriculture Taiwan, Taiwan Government Agencies*, dan laman resmi lainnya serta dari portal berita terpercaya seperti *Taiwan News* dan *Taiwan Today*.

1.8.3 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam penelitian ini. Teknik analisa data kualitatif menurut Klotz 2008 merupakan teknik analisis yang tidak berbasis angka, artinya dalam mengukur suatu fenomena sosial dalam sebuah penelitian, peneliti menggabungkan berbagai persepsi, ide, dan analisa dari sebuah data yang bukan bersifat angka (misalnya data statistik) melainkan menggunakan analisis tekstual.⁵⁵ Menurut Weng 2019 metode kualitatif biasa dilakukan dalam penelitian hubungan internasional karena biasanya dalam penelitian hubungan internasional bukanlah metrik yang dapat dihitung dan teratur, melainkan sesuatu yang bersifat abstrak (tidak beraturan) sehingga membutuhkan analisis terhadap suatu kasus untuk menguraikan dan memvalidasi argumen mereka. Metode

⁵⁴ Carter, J. R. (1998). Description is not explanation: A methodology of comparison. *Method & Theory in the Study of Religion*, 10(2), 133-148.

⁵⁵ Klotz, A. P. (2008). *Qualitative methods in international relations*. Palgrave Macmillan.

kualitatif menggabungkan bukti non-numerik dengan hasil penelitian kuantitatif yang didasarkan pada penggunaan bukti numerik.⁵⁶

1.8.4 Jangkauan Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian agar tidak terlampau meluas, maka penulis memilih jangkauan waktu penelitian agar penelitian fokus pada kasus yang ingin dibahas pada kurun waktu yang telah ditentukan. Jangkauan waktu penelitian yang diambil penulis adalah tahun 2011-2018. Pengambilan jangkauan waktu penelitian disesuaikan dengan tahun berlakunya ECFA per 1 Januari 2011.⁵⁷ Pemilihan jangkauan waktu penelitian hingga tahun 2018 didasarkan pada puncak ekspor agrikultur tertinggi Taiwan tahun 2018 mencapai \$ 5,47 miliar pada 2018 dan merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu dua dekade.⁵⁸

1.8.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab, dalam masing-masing bab tersebut memuat pembahasan sebagai berikut;

BAB I berisi latar belakang masalah dari penelitian, dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian kerangka

⁵⁶ Weng, K. (2019). Student Feature – Spotlight on Qualitative Methods in International Relations. *E-International Relations*.

⁵⁷ Ahn, B. I., Liao, P. A., & Kim, H. (2014). Impacts of the cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement on the grouper fish markets in Taiwan and mainland China. *China Agricultural Economic Review*.

⁵⁸ Taiwan Today. (2019, February 19). *2018 agricultural exports hit 20-year high in Taiwan*. Retrieved from Taiwan Today: <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=150134>

berfikir, dilanjutkan dengan sintesa pemikiran, dan argumen utama penulis serta metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB II berisi pemaparan tentang *Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) Cina Taiwan, hal-hal yang melatar belakangi ditandatanganinya perjanjian tersebut, komponen ECFA, serta implementasi dan dampaknya terhadap berbagai sektor khususnya sektor pertanian Taiwan.

BAB III berisi pemaparan data kebijakan ekspor agrikultur Taiwan sebagai dampak dari ECFA melalui tiga indikator; kebijakan luar negeri, peraturan perdagangan, dan perusahaan kecil menengah/ *small medium enterprise* (SME).

BAB IV berisi analisa penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan serta saran.